



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

AKSELERASI KEANGGOTAN PENUH INDONESIA DI OECD

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Muda
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 dan bermarkas di Paris, Perancis. Organisasi ini terdiri dari 38 negara anggota yang mayoritas merupakan negara-negara maju dan berkembang. OECD bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas ekonomi, serta perbaikan kesejahteraan sosial di negara-negara anggotanya. OECD juga melakukan penelitian, menganalisis kebijakan, dan memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggotanya dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kebijakan sosial, lingkungan, pendidikan, dan inovasi. Selain itu, OECD mempromosikan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan masalah perdagangan internasional. OECD juga mengumpulkan data ekonomi dan statistik dari negara-negara anggotanya dan menerbitkannya dalam berbagai publikasi yang menjadi sumber informasi penting bagi pengambil kebijakan.

Pemerintah terus mendorong Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mengakselerasi keanggotaan penuh Indonesia. Intensi Indonesia menjadi anggota OECD telah dibahas dalam rangkaian pertemuan OECD *Council* di bulan September dan Oktober 2023, dan berlanjut pada beberapa pertemuan OECD *Council* berikutnya sampai Desember 2023, sebagai pertimbangan negara anggota OECD untuk memutuskan sikap terhadap minat Indonesia tersebut. Apabila OECD *Council* memutuskan menerima intensi Indonesia, selanjutnya akan disusun program kerja dalam memulai tahapan menuju keanggotaan Indonesia. Anggota OECD yang berjumlah 38 negara menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi anggota OECD, Pemerintah akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Komite tersebut akan fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD, pengawasan (*monitoring*) atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.

Ada beberapa manfaat jika Indonesia menjadi anggota OECD, yaitu:

- Pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat cukup signifikan.
- Indonesia dapat terbebas dari jebakan negara *middle income trap*.
- Indonesia mendapatkan data OECD yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dijalankan.
- Indonesia dapat memanfaatkan sumber-sumber milik OECD, seperti analisis yang dibuat oleh Sekretariat OECD. Analisis tersebut biasanya meliputi kondisi ekonomi global secara keseluruhan, yang tidak bisa dengan mudah dibuat oleh satu negara saja.

- Status keanggotaan OECD juga dapat menarik minat investasi asing atau *foreign direct investment* (FDI). Hal ini disebabkan sejumlah organisasi internasional mensyaratkan keanggotaan OECD untuk berinvestasi di suatu negara.
- Keanggotaan Indonesia di OECD akan mendorong reformasi ekonomi dan tata kelola nasional yang lebih baik, yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Keanggotaan OECD dapat memfasilitasi perjanjian perdagangan dan kemitraan sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi dunia usaha Indonesia ke pasar internasional, dalam meningkatkan ekspor produk industri nasional dan menciptakan peluang pertumbuhan bagi perusahaan dalam negeri.

Meskipun ada banyak manfaat, ada sedikit kekhawatiran apabila Indonesia menjadi anggota OECD. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, apabila bergabung dengan OECD maka Indonesia perlu meliberalisasi undang-undang, terutama undang-undang yang mengatur perizinan, persaingan usaha, dan perdagangan. Dengan demikian perdagangan semakin bebas dan memperkecil perlindungan terhadap usaha lokal.

Atensi DPR

Banyak manfaat yang didapatkan Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Namun persyaratan untuk menjadi anggota OECD tidaklah muda. Beberapa persyaratan utama adalah: ekonomi yang maju dan berkembang; sistem peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan standar OECD; transparansi dan anti korupsi; perlindungan HAM; kesesuaian dengan instrumen hukum OECD; keterbukaan ekonomi; menyediakan data ekonomi yang akurat; dan kesepakatan Dewan OECD. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, DPR RI khususnya Komisi VI yang membidangi investasi dan perdagangan perlu terus mendorong pemerintah berupaya memenuhi persyaratan tersebut agar Indonesia segera diterima menjadi anggota OECD. Komisi VI DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah nantinya untuk memperhatikan, memberdayakan, dan melindungi pengusaha lokal yang terdampak perdagangan bebas agar mereka tidak terpinggirkan setelah Indonesia menjadi anggota OECD.

Sumber

Investor Daily, 30 November 2023;
liputan6.com, 11 Oktober 2023;
nasional.kontan.co.id, 18 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023